

Upaya peningkatan taraf hidup perempuan pembatik melalui peran jender : studi kasus pada komunitas pembatik tulis Kota Tegal

Novie Yektiningsih, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20342722&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Peran jender merupakan peran yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan karena jenis kelamin mereka berbeda, peran ini tidak sama sesuai nilai dan norma sosial-budaya yang mengkonstruksikannya.

Kebutuhan praktis jender adalah kebutuhan yang muncul dalam keseharian, sedangkan kebutuhan strategis jender merupakan upaya jangka panjang dan berkelanjutan dengan upaya memperbaiki posisi sosial perempuan.

Saat pendapatan keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, maka perempuan akan bekerja untuk menambah keuangan keluarga.

Perempuan berpendidikan tinggi akan bekerja di sektor formal, sedangkan perempuan yang berpendidikan relatif rendah akan terserap di sektor informal. Penelitian ini akan melihat upaya peningkatan taraf hidup pembatik tulis melalui peran jender yang berlaku dalam komunitas tersebut, dengan menggunakan metode Diskusi Kelompok Terarah (Focused Group Discussion, FGD) dan Proses Hirarki Analitik (Analytical Hierarchy Process, AHP).

FGD

Dari Hasil FGD, diketahui bahwa mayoritas pembatik berpendidikan rendah dan memiliki suami yang bekerja sebagai tukang/ buluh. Jika sedang bekerja, pendapatan suami adalah Rp. 20.000,- perharinya. Tapi seringkali suami terpaksa tinggal di rumah selama berbulan-bulan karena tidak mendapat pekerjaan. Jika suami tidak bekerja, maka pendapatan kaum pembatik yang menjadi bantalan ekonomi keluarga. Padahal produktivitas mereka terbatasi 3 lembar kain (tapih) perbulan dan harga jual Rp. 70.000 - Rp 120.000, dengan demikian keuntungan bersih yang dicapai tidak lebih dari 150.000,-

Beberapa pembatik mulai melakukan spesialisasi dengan menyerahkan tahap-tahap tertentu dalam pengolahan kain batik untuk dikerjakan oleh rekan sesama pembatik. Hasilnya cukup menggembirkan, produktivitas meningkat hingga 60%, yaitu 5 lembar tapih perbulan. Meski demikian penambahan produktivitas ini belum dibarengi dengan peningkatan permintaan. Akibatnya pembatik kurang termotivasi untuk menekuni pekerjaannya.

Kecilnya skala usaha membuat pembatik tidak memisahkan

manajemen keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Akibatnya saat keluarga menghadapi kebutuhan mendesak, produksi terhenti karena dana yang tersedia dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Jika kekurangan modal, pembatik akan meminjam dan rekan sesama pembatik ataupun sanak famili. Pilihan ini dirasakan lebih praktis, tanpa mengikutsertakan lembaga keuangan yang dianggapnya memiliki prosedur berbelit. Sebagai mata pencaharian, IKRT Batik Tegalan masih dipandang sebelah mata. Penyebabnya antara lain tidak jelasnya alokasi waktu dan produktivitas yang menurun saat pembatik memiliki anak balita. Meski pembatik tidak merasakan adanya beban ganda akibat beragam peran yang harus dilakukan, sikap ini disebabkan sistem sosial yang berakibatkan menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga. Sama halnya dengan pekerjaan rumah tangga lain, batik dianggap sebagai urusan perempuan.

Hubungan antar pembatik juga kurang harmonis. Hal ini terutama disebabkan keberadaan kelompok dalam komunitas batik yang tidak banyak berfungsi. Padahal jika dimanfaatkan secara maksimal, kelompok dapat menjadi jembatan informasi antar pembatik, antara pembatik dengan pemerintah (berkaitan dengan berbagai program/ kebijakannya) dan antara pembatik dengan konsumen. Menilik sisi psikologis perempuan yang relatif lebih mudah bersosialisasi, maka manajemen kelompok yang baik akan membuat pembatik dapat saling memotivasi.

AHP

Tahap selanjutnya, hasil FGD yang diperbandingkan dengan berbagai penelitian serupa kemudian menjadi input bagi hirarki backward process dalam tahap AHP. Hirarki backward process dari peningkatan taraf hidup perempuan pembatik terdiri atas lima level. Level Pertama merupakan tujuan utama (GOAL) yang ingin dicapai, adalah Peningkatan Taraf Hidup Perempuan Pembatik Tulis Tegalan melalui Pelan Jender. Level 2 adalah Skenario, ada 3 (tiga) alternatif skenario (berupa pendekatan-pendekatan atas peran jender para pembatik) yang dapat dilakukan untuk mencapai GOAL, yaitu: (1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, (2) Melestarikan budaya lokal, (3) Pemberdayaan perempuan. Level 3 adalah Kendala, ada 4 (empat) kendala besar dalam melaksanakan skenario untuk mencapai tujuan, yaitu: (1) Keterbatasan modal, (2) Tidak adanya informasi pasar yang lebih luas, (3) Beban ganda perempuan, (4) Manajemen kelompok yang tidak berfungsi. Level 4 adalah Pelaku, secara garis besar ada 4 pelaku yang terlibat dalam proses ini, yaitu: (1) Pemerintah Kota Tegal, (2) Lembaga Keuangan atau perbankan, (3) Pembatik, (4) Masyarakat. Level 5 adalah Kebijakan, ada 5 alternatif kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Pelatihan teknis, (2) Membuka akses ke pasar yang lebih luas, (3) Kemudahan pinjaman modal, (4)

Pelatihan manajemen usaha berbasis pola usaha perempuan, (5) Kemitraan dengan designer.

Kuesioner' AHP dibagikan kepada 13 orang expert yang dipercaya mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan taraf hidup pembatik Kota Tegal. Dalam penghitungan persepsi skala Iokal, total expert dibagi menjadi empat unsur. Keempatnya memberikan jawaban balk dengan tlngkat Inkonsistensi dibawah 0,1, yaitu unsur Pemerintah (0,02), unsur Pembatik (0.02), unsur Lembaga Keuangan/ Perbankan (0.03) dan unsur Masyarakat (0.05).

Dalam skala prioritas Iokal, masing-masing unsur memberikan persepsi yang bervariasi. Unsur Pemerintah memprioritaskan skenario: peningkatan kesejahteraan keluarga (0.561), kendala: keterbatasan modal (0.486), pelaku: Pemkot Tegal (0.463) dan kebijakan: kemudahan pinjaman modal (0.256). Unsur Pembatik memprioritaskan skenario: peningkatan kesejahteraan keluarga (0.561), kendala: tidak adanya informasi pasar yang lebih luas (0.362), pelaku: Pemkot Tegal (0.522) dan kebijakan: pelatihan manajemen dan pola usaha perempuan (0.242). Unsur Lembaga Keuangan/ Perbankan memprioritaskan skenario: pemberdayaan perempuan (0.653), kendala: tidak adanya informasi pasar yang lebih luas (0.353), pelaku: Pemkot Tegal (0.350) dan kebijakan: pelatihan teknis (0.281). Unsur Masyarakat memprioritaskan skenario: peningkatan kesejahteraan keluarga (0.593), kendala: keterbatasan modal (0.499), pelaku: Pemkot Tegal (0.461) dan kebijakan: kemudahan pinjaman modal (0.333).

Sedangkan dalam prioritas global dimana pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki bobot 20%, maka persepsi yang dihasilkan memprioritaskan skenario: peningkatan kesejahteraan keluarga (0.523), kendala: keterbatasan modal (0.458), pelaku: Pemkot Tegal (0,474) dan kebijakan: kemudahan pinjaman modal (0.253). Persepsi global ini memiliki tingkat inkonsistensi 0.03.

Kesimpulan Penelitian

Secara umum, keberadaan komunitas pembatik bukan hanya untuk melestarikan tradisi lokal, namun yang lebih penting lagi, pembatik merupakan alternatif pekerjaan bagi para perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Stagnasi usaha batik Tegal sesungguhnya timbul karena kebijakan yang dibuat tidak tepat sasaran.

Berbagai kesimpulan yang didapat: diambil setelah melakukan penelitian adalah:

1. Pemerintah masih mempunyai porsi terbesar sebagai pihak yang bertanggung jawab dan dapat meningkatkan taraf hidup pembatik Tegal. Meski Lembaga Keuangan/ Bank juga dapat berperan dalam pengembangan IKRT Batik, namun patut dipertimbangkan

kondisi psikologis pembatik yang tidak terblasa berhubungan dengan Perbankan.

2. Ketidak sesuaian persepsi antara Pemerintah dan Masyarakat menjadikan kebijakan yang diberikan tidak menyentuh akar permasalahan. Pemerintah (dan institusi lain pendukungnya) menganggap kendala terbesar adalah permodalan, maka kebijakan yang muncul lebih diprioritaskan pada pemberian modal. Pembatik justru menganggap kendala yang lebih penting adalah kurangnya Informasi pasar, sehingga selain pelatihan manajemen yang berbasis pola usaha perempuan, kebijakan lain yang diharapkan adalah membuka pasar yang lebih luas. Akibat ketidak sesuaian ini, maka suntikan modal dari Pemerintah tidak menambah output produksi. Penyebabnya, pembatik tidak mengetahui pasar lain untuk menyalurkan kelebihan produksinya. Pemasaran terhenti, perputaran modal pun terhambat.
3. Prioritas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah lebih difokuskan pada sisi penawaran (supply side) akibatnya pembatik menjadi obyek kebijakan karena skillnya dianggap kurang dan menjadi penyebab tidak munculnya market clearing di pasar batik.
4. Sebagian besar para pengrajin masih menganggap kegiatannya hanya sebagai pengisi waktu luang, sehingga motivasi untuk mengembangkan usahanya sangat terbatas.
5. Apabila kebijakan yang ditempuh adalah bantuan/ kemudahan permodalan, dalam-hal ini tentu saja pemberi kredit harus yakin bahwa membatik merupakan kegiatan yang bernilai ekonomis.

Aspek gender dalam pemenuhan kebutuhan ini adalah dengan memperhatikan kesulitan yang "khas" perempuan seperti kepemilikan kolateral dan pola usaha yang khas } sehingga kredit yang diberikan dapat sesuai dengan kondisi pengusaha IKRT Inl.

6. Upaya peningkatan taraf hidup perempuan pembatik seharusnya benar-benar merupakan kebijakan yang bersifat partisipatif. Untuk itu karakter pembatik yang tidak dapat dilepaskan dari kultur lokal harus difahami oleh para pembuat kebijakan.

Saran dan Rekomendasi Kebijakan

1. Upaya melibatkan Lembaga Keuangan/ Bank sebaiknya difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tegal, karena walau bagaimanapun Perbankan tetap memiliki orientasi keuntungan dalam menjalankan usahanya. Dengan jaminan ataupun pengakuan pemerintah pada Perbankan terhadap industri kerajinan batik, maka BUMD ini akan dapat memberikan kredit lunak yang sesuai dengan karakteristik sosial-budaya mereka.
2. Langkah awal menuju profesionalitas dapat dimulai dengan

pembukuan keuangan usaha yang terpisah dari keuangan keluarga. Laporan ini dapat menjadi pertimbangan saat melakukan permohonan kredit usaha kecil ke Perbankan. Sedangkan secara umum beban ganda dapat dilatasi dengan kerja bersama dalam kelompok.

3. Sisi penawaran yang selama ini menjadi fokus pengembangan IKRT Batik sebaiknya juga diimbangi oleh sisi permintaannya (demand side). Kerjasama dengan designer dapat memecahkan masalah ini, karena pembatik tidak hanya dapat mempelajari trend, tapi juga mendapatkan pangsa pasar dan sarana promos! produk.

4. Bantuan modal, pelatihan teknis serta pelatihan manajemen yang selama ini diadakan oleh Disperinclag Kota Tegal akan lebih baik lagi jika mempertimbangkan pola usaha bersama/ kelompok, dengan pertimbangan nilai budaya dan tradisi yang berlaku dalam komunitas tersebut.

5. Membangun pengertian masyarakat di setiap kesempatan bahwa batik memiliki misi budaya, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan saja.

6. Pendekatan pemberdayaan perempuan akan sangat bermanfaat bagi pengembangan IKRT Batik karena masalah yang dihadapi sangat spesifik dan kompleks. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah melibatkan kaum perempuan dalam setiap proses pengamman kebijakan di lingkungan mereka, misalnya melalui Musrenbangkel, bukan hanya sebagai wakil dari organisasi khas perempuan seperti PKK, tapi sebagai pengusaha kecil yang berpotensi.

7. Para pengambil kebijakan sebaiknya mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai pemberdayaan perempuan, khususnya IKRT yang dijalankan oleh pengusaha perempuan. Pengembangan wawasan bukan hanya bagi dinas atau kantor tertentu saja.

<hr>